



CORNELIS

**Pontianak, BERKAT.**

Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH, mengatakan perihal laporan aset yang sudah diutarakan dan diberikan pengarahannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sudah jelas.

"Tinggal dikerjakan saja. Asal mau kerja bisa selesai," tegasnya usai Rapat Pari-

# Cornelis : Arahan BPK Jelas, Asal Pejabat Kalbar Mau Kerja

purna Istimewa Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun 2010, di Balairungsari, Gedung DPRD Kalbar, Kamis (21/7).

Dikatakannya, secara teknis penyelesaian laporan keuangan dan aset sudah diarahkan oleh Anggota Komisi VI BPK RI, Rizal Djilil, termasuk jalan keluar yang lengkap, tinggal para pejabat pemangku kepentingan saja, mau bekerja atau tidak.

"Ada instruksinya, dan sudah jelas semua, siapa yg bertanggung jawab mengurusnya, jika tidak mampu, buat tim

dan berkonsultasi ke dewan, tinggal pejabat kita saja yang menerima ini dengan kemauan bekerja," kata Gubernur Cornelis.

Anggota Komisi VI BPK RI, Rizal Djilil mengingatkan Pemprov Kalbar untuk serius memperhatikan persoalan aset dengan membentuk tim.

"Sebenarnya Kalbar bisa mendapat opini jauh lebih baik dari WDP. Sedikit lagi bisa wajar tanpa pengecualian. Persoalannya, saya meminta perhatian Sekda untuk serius terhadap aset negara," katanya.

Menurut Rizal, pengelolaan aset

merupakan tugas jajaran Sekda, sedangkan Gubernur bertugas mengambil keputusan strategis. Hal yang perlu diperhatikan adalah inventarisasi aset bergerak dan tidak bergerak. Aset-aset tersebut perlu diperbaiki. Selama ini komitmen Gubernur dan dewan terhadap permasalahan aset. "Kami meminta pemprov membentuk tim, DPRD juga bisa membentuk panitia kerja terhadap persoalan aset," katanya.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun 2010. (nia)